



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

== PERUBAHAN == RENCANA KERJA TAHUN 2025

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO



DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dokumen Perubahan Rencana kerja organisasi perangkat daerah PD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto merupakan acuan perencanaan kegiatan selama satu tahun. Adapun penyusunan Rencana Kerja PD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan aturan secara rinci berpedoman dari Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini merupakan penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto periode Tahun 2025-2029 dan nantinya akan dituangkan ke dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dimana terdapat 4 (empat) program yang terdiri dari 3 (Tiga Program Prioritas) dan 1 (satu) program pendukung.

Harapan kami semoga dokumen perubahan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto ini benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif Tahun 2025.

Mojokerto, 7 Juli 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO,



MOHAMMAD TAUFIQURROHMAN, S.STP., MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19770221 199511 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISIii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 LANDASAN HUKUM..... 3

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN6

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 6

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN KE II TAHUN BERKENAAN 8

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TW. II DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 8

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 15

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH... 18

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD..... 19

2.5 PENELAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 35

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 36

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 36

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 37

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 41

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 55

BAB V PENUTUP 68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 3 yaitu *“Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah”*, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (PD) diharuskan untuk menyusun rancangan rencana kerja PD sebagai acuan perencanaan kegiatan untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan rencana kerja PD ini mengacu pada Draft [Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah \(RPJMD\) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029](#) dan Draft [Rencana Strategis \(RENSTRA\) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029](#), serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja PD dibahas pada forum PD yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD, penyelarasan program dan kegiatan antar PD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD. Renja PD ditetapkan melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang dikoordinir oleh Bappeda. Kemudian Perubahan Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun $n+1$.

Berdasar Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, penyusunan rencana kerja yang merupakan dokumen perencanaan yang dapat memberikan arahan sehingga memudahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara terukur. Rencana kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, maka dalam penyusunannya memerlukan data dan informasi yang akurat sebagai bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan. Selain itu rencana kerja ini

menjabarkan visi dan misi kepala daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dalam Pembangunan di Bidang Ketenagakerjaan yang efektif, efisien dan akuntabel maka perlu adanya rumusan tujuan yang jelas, faktual dan realistis.

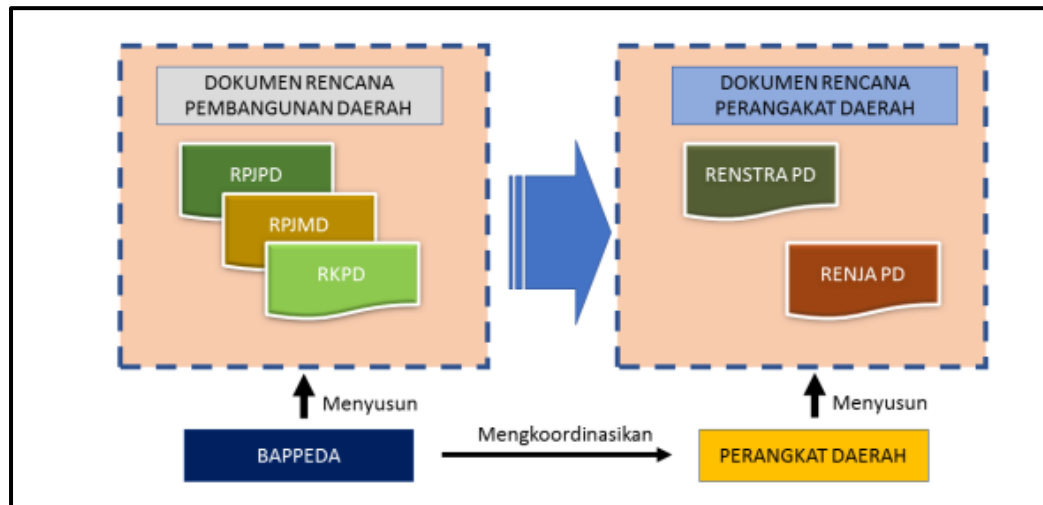
Bahwa dalam merumuskan tujuan yang jelas, faktual dan realistis perlu diketahui dan diidentifikasi terlebih dahulu permasalahan di bidang ketenagakerjaan yang terjadi di wilayah Kabupaten Mojokerto yang dikaitkan dengan kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kebijakan di daerah Provinsi. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi antara visi dan misi para pemangku kewenangan di pusat dan daerah yang meliputi antara lain:

Tabel 1
KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMERINTAH PUSAT (KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN),
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR DAN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

NO	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN		PEMERINTAH DAERAH PROV. JAWA TIMUR		PEMERINTAH KAB. MOJOKERTO	
	VISI	SASARAN STRATEGIS	VISI	SASARAN STRATEGIS PD	VISI	SASARAN STRATEGIS PD
	Terwujudnya ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, inklusif, produktif, dan berkeadilan menuju Indonesia emas 2045	1. Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan; 2. Meningkatnya tata kelola dan pelayanan publik Kementerian Ketenagakerjaan yang profesional dan berintegritas	Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera Unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong	1. Meningkatnya perluasan kesempatan kerja di sektor Ketenagakerjaan; 2. Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam rangka hubungan industrial yang kondusif dan perlindungan tenaga kerja; 3. Meningkatnya taraf ekonomi transmigran.	Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur	1. Meningkatnya penempatan tenaga kerja; 2. Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang harmonis dinamis dan kondusif

Perumusan kebijakan tersebut kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, dengan mengacu pada P-RKPD tersebut maka diharapkan dokumen Rencana Kerja PD yang tersusun terjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan di bidang Ketenagakerjaan dapat berhasil dan tepat sasaran melalui konsistensi pemahaman antar dokumen baik ditingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Diagram 1
Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jawa

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum penyusunan perubahan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2444, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Undang-undang No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
23. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
29. Draft Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor ... Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1)
33. Draft Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029;
34. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto:

➤ Maksud:

1. menentukan sasaran indikator dan penetapan kinerja dalam bentuk penyusunan program kegiatan;
2. menentukan lokasi kegiatan dan menyusun indikator kinerja kegiatan;
3. serta menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang, sehingga mampu menjawab tuntutan agar pembangunan di bidang ketenagakerjaan khususnya di Kabupaten Mojokerto lebih efektif, efisien, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan.

➤ Tujuan:

Tujuan disusunnya rencana kerja adalah sebagai perwujudan dokumen perumusan, perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ketenagakerjaan pada tahun N+1 sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan rancangan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto berdasarkan Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang rancangan rencana kerja perangkat daerah, proses penyusunan rancangan rencana kerja perangkat daerah, Keterkaitan antara RENJA PD dengan dokumen RKPD, RENSTRA PD, RENJA K/L dan RENJA PROVINSI, Tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan rancangan rencana kerja perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan rancangan rencana kerja perangkat daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya, Analisis Kinerja Pelayanan PD dan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan uraian tentang indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana.

BAB IV. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN
TRIWULAN KE II TAHUN BERKENAAN

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TW. II DAN
CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto pada Renja tahun lalu dan pencapaian target Renstra PD bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan dalam Dokumen Renstra PD. Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029 pada umumnya dapat tercapai dengan baik, hal ini dapat dilihat dan disajikan pada tabel pencapaian kinerja program dan kegiatan sebagai berikut:

TABEL TC-29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN)
KABUPATEN MOJOKERTO

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA KAB. MOJOKERTO

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (N-3/2023)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/ 2024)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N- 2/2024)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) (2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
	URUSAN WAJIB									
	KETENAGAKERJAAN									
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,40 (A)	83,01	83,50 (A)	81,30	97,37	81,45 (A)	245,76	2,88
		Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	1 inovasi	2	2 inovasi	2	100	2 inovasi	6	6,00
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program dinas tenaga kerja yang tercapai sesuai target	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	3	3,00
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	7	3,50
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	12 laporan	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	20	5,00
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	100%	90%	90,77%	100,00	90,80%	2,8157	3,13

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (N-3/2023)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/ 2024)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/2024)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) (2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Pembiayaan Gaji dan TunjJumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 orang/bln	36 orang/bln	36 orang/bln	36 orang/bln	100	36 orang/bln	108	3,00
2.07.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan admnistrasi pelaksanaan tugas ASN	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks profesionalitas asn dinas tenaga kerja	75%	75%	75%	86%	100	86,16%	2,4716	3,30
2.07.01.2.02.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100	100%	3	3,00
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 paket	18 paket	7 paket	6 paket	85,71	6 paket	30	5,00
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 paket	15 paket	7 paket	5 paket	71,43	7 paket	27	5,40
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	13 paket	39 paket	13 paket	13 paket	100	11 paket	63	4,85
2.07.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan/ material yang disediakan	1 paket	3 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	5	5,00
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 laporan	300 laporan	100 laporan	100 laporan	100	100 laporan	500	5,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (N-3/2023)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/ 2024)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/2024)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) (2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100	100%	3	3,00
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	100	24 laporan	72	6,00
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	60	5,00
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam keadaan baik	100%	100%	100%	100%	100	100%	3	3,00
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	100	6 unit	18	3,00
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	1 unit	0 unit	1 unit	0	0 unit	2	2,00
2.07.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	30 unit	15 unit	18 unit	15 unit	83,33	18 unit	48	1,60
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase program dan kegiatan yang mengacu perencanaan tenaga kerja	100%	100%	100%	100%	100	100%	3	3,00
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	100	0 dokumen	1	0,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (N-3/2023)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/ 2024)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/2024)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) (2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	1	0,00
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	30%	28,83	30%	52,83%	176,1	30%	29,66	98,86
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi	128 orang	117 orang	112 orang	117 orang	100	112 orang	346	2,70
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	128 orang	117 orang	112 orang	112 orang	100,00	48 orang	277	2,16
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka optimaslisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	16 lembaga	16 lembaga	0 lembaga	0 lembaga	0	24 lembaga	40	2,50
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina	30 lembaga	30 lembaga	15 lembaga	15 lembaga	100	0 lembaga	45	1,50
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	30 lembaga	30 lembaga	15 lembaga	15 lembaga	100,00	0 lembaga	45	1,50
2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan yang diberikan konsultasi produktivitas	4 perusahaan	4 perusahaan	0 perusahaan	0 perusahaan	100	0 perusahaan	4	1,00
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	4 perusahaan	12 perusahaan	0 perusahaan	0 perusahaan	0	0 perusahaan	12	3,00
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Informasi Lowongan Kerja yang Terpenuhi	75%	72,41	72%	72,98%	101,36	16%	73,3	97,73

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (N-3/2023)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/ 2024)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/2024)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) (2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
2.07.04.2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Antar Kerja Kab/ Kota yang tercapai sesuai target	100%	100%	100%	100%	100	100%	3	3,00
2.07.04.2.01.02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	3 orang	3 orang	1 orang	1 orang	100,00	1 orang	5	1,67
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	20 orang	30 orang	30 orang	30 orang	100,00	25 orang	85	4,25
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Fasilitas pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) yang tercapai sesuai target	100%	100%	100%	100%	100	100%	3	3,00
2.07.04.2.03.03	Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	50 orang	135 orang	50 orang	50 orang	100,00	100 orang	285	5,70
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah orang terfasilitasi perlindungan PMI	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	100	20 orang	60	3,00
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/ PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	20 orang	60 orang	20 orang	20 orang	100,00	35 orang	115	5,75
2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah orang peserta yang diberikan fasilitas, koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA	0 orang	30 orang	0 orang	0 orang	100	0 orang	30	0,00
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang Peserta yang Diberikan Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA	0 orang	30 orang	0 orang	0 orang	0,00	0 orang	30	0,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (N-3/2023)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/ 2024)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/2024)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) (2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	80%	80,95	80%	85,71%	107,14	86%	82,6671	103,33
		Persentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial	56%	56,91	56%	76,31%	136,27	11,7%	57,79	103,20
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang tercapai sesuai target	100,00%	100%	100,00%	100%	100	100,00%	3	3,00
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	4 perkara	12 perkara	4 perkara	4 perkara	100,00	20 perkara	36	9,00
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	10 perkara	20 perkara	10 perkara	10 perkara	100,00	0 perkara	30	3,00
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	100,00	1 lembaga	3	3,00
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	200 orang	27900 orang	29024 orang	29024 orang	100,00	27930 orang	84854	424,27
	JUMLAH						116,89			

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bahwa kinerja pelayanan di Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Indikator Kinerja yang telah dirumuskan terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja utama tahun 2021 - 2024, antara lain:

1. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja;
2. Persentase Peserta Pelatihan Yang Berkualitas Dan Kompeten;
3. Persentase tingkat perselisihan hubungan industrial di perusahaan;
4. Persentase Perusahaan Yang Mengikutsertakan Pekerja dalam Jaminan Sosial.

Dan pada tahun 2025-2026, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja berubah menjadi 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu:

1. Persentase penempatan tenaga kerja;
2. Persentase tingkat perselisihan hubungan industrial

Target dan realisasi pencapaian dari 4 (empat) indikator kinerja utama dan Indikator kinerja individu sebagaimana terdapat pada Tabel TC-30.

TABEL TC-30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	INDIKATOR	SPM STANDAR / OPERASIO NAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN					PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	TAHUN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) LAMA/SASARAN STRATEGIS															
1	persentase penyerapan tenaga kerja			82%	82%	84%	86%		82,09%	82,10%	84,83%	86,21%			Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1
2	persentase peserta pelatihan yang berkualitas dan kompeten			85%	85%	85%	87%		85,20%	85,06%	85,21%	89,60%			Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1
3	persentase tingkat perselisihan hubungan industrial di perusahaan			6%	6%	5%	5%		2,25%	2,15%	2,25%	1,50%			Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1
4	persentase perusahaan yang mengikutsertakan pekerja dalam jaminan sosial			50%	51%	51%	52%		54,72%	55,47%	85,84%	87,02%			Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BARU															
1	Persentase penempatan tenaga kerja							86,50%						86,50%	Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1
2	Persentase tingkat perselisihan hubungan industrial di perusahaan							1,50%						1,50%	Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)/PROGRAM LAMA															
1	Persentase informasi lowongan kerja yang terpenuhi			70%	70%	72%	72%		70,27%	71,74%	72,41%	72,98%			Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1

NO	INDIKATOR	SPM STANDAR / OPERASIO NAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN					PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	TAHUN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Persentase peserta pelatihan berbasis kompetensi			20%	25%	25%	30%		28,07%	25,24%	26,35%	52,83%			Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1
3	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan			80%	80%	80%	80%		80,95%	100%	80,95%	85,71%			Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1
4	Persentase tenaga kerja yang terdaftar jaminan sosial			55%	55%	56%	56%		55,38%	55,02%	76,08%	76,31%			Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1
5	Persentase prog dan kegiatan yang mengacu perencanaan tenaga kerja			100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%			Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)/PROGRAM BARU															
1	Persentase lulusan peserta pelatihan berbasis kompetensi							92%						92%	Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1
2	Persentase perusahaan penyedia informasi lowongan kerja pada tahun n							16%						16%	Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1
3	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan							86%						86%	Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1
4	Persentase tenaga kerja yang terdaftar jaminan sosial							11,7%						11,7%	Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1
5	Persentase prog dan kegiatan yang mengacu perencanaan tenaga kerja							100%						100%	Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1
6	Persentase calon transmigran yang ditempatkan							100%						100%	Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bahwa isu-isu penting ketenagakerjaan yang mempengaruhi tingkat kinerja pelayanan di Dinas Tenaga Kerja diantaranya sebagai berikut:

NO	ISU -ISU	KENDALA DAN TANTANGAN	REKOMENDASI
1	Masih tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);	Tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih berada di bawah target yang dicanangkan yaitu 3,45%, sementara pencapaian angka penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,68%. Salah satu faktor penyebabnya adalah banyaknya penduduk usia angkatan kerja yang belum mempunyai keterampilan atau kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan di dunia industri dan wirausaha, sehingga sulit bersaing di pasar bebas baik di level lokal/ daerah dan luar Daerah serta kekurangsiapan menghadapi era industri 4.0	Bahwa perlunya Pelatihan yang berbasis ketrampilan dan sertifikasi dalam berbagai sektor usaha terhadap pencari kerja yang dengan bentuk uji kompetensi agar pencari kerja/ tenaga kerja tersebut mampu bersaing di level lokal/ daerah dan luar daerah khususnya kesiapan dalam menghadapi era industri 4.0. Selain itu meningkatkan penyuluhan bursa kerja serta informasi kerja ke dalam bentuk bursa kerja serta mengadakan pembinaan serta perluasan kesempatan kerja dengan berkoordinasi dengan para perusahaan agar dapat membuka sektor pekerjaan baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja secara optimal
2	Lemahnya Perlindungan dan fasilitas Kesejahteraan Tenaga Kerja di perusahaan	- Masih banyaknya perusahaan-perusahaan di wilayah kabupaten Mojokerto yang belum melaksanakan norma ketenagakerjaan yang baik dan benar termasuk penyediaan sarana dan prasarana keselamatan kerja K3 yang belum merata di perusahaan di wilayah Kabupaten Mojokerto; - Minimnya angka Tenaga Kerja yang diikut sertakan ke dalam Program Jaminan Sosial (Cth. BPJS) Ketenagakerjaan sebagai fasilitas wajib dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja;	- Bahwa perlu dimaksimalkan pembinaan maupun sosialisasi penerapan norma kerja, sosialisasi penerapan sarana dan prasarana keselamatan kerja (K3) di perusahaan dalam bentuk monitoring secara langsung dan berkala sebagai sarana hubungan industrial untuk menciptakan kondisi hubungan industrial yang harmonis dan dinamis di wilayah Kabupaten Mojokerto; - Bahwa perlu dimaksimalkan pembinaan maupun sosialisasi agar perusahaan diwilayah Kabupaten Mojokerto mengikutsertakan seluruh pekerjaanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk preventif secara langsung untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk menciptakan ketenangan dan kenyamanan dalam bekerja bagi pekerja di tempat kerjanya;

NO	ISU -ISU	KENDALA DAN TANTANGAN	REKOMENDASI
3	tingginya resiko Perselisihan Hubungan Industrial di wilayah Kabupaten Mojokerto	Tingginya angka Perselisihan Hubungan Industrial antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja;	Bahwa dengan banyaknya faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan hubungan industrial yang terjadi di wilayah Kabupaten Mojokerto sebagai contoh isu yang paling banyak terjadi adalah tingginya angka Upah Minimum Kerja, sehingga banyak perusahaan yang mencoba untuk bertahan atau survive dengan cara mengurangi jumlah karyawan maka pemutusan hubungan kerja massal atau penutupan perusahaan sebagai cara yang terakhir yang dapat dilakukan oleh pihak pengusaha agar dapat terus menjalankan perusahaannya tidak dapat terhindarkan lagi. Maka Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto dalam hal ini akan mengupayakan secara maksimal pendekatan secara sosialisasi maupun pembinaan hubungan industrial dalam bentuk klasikal atau ke perusahaan agar setiap perselisihan yang terjadi dapat terselesaikan di tingkat perusahaan secara bipartit
4	Lemahnya perlindungan dan fasilitasi terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Lemahnya perlindungan dan fasilitasi terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Perlunya pembinaan dan monitoring secara berkelanjutan terhadap perlindungan dan fasilitasi tCalon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari proses dan tata cara pemberangkatan, selama bekerja dan setelah hubungan kerja berakhir (pemulangan)
5	Kurangnya Animo Masyarakat terhadap Fasilitasi Transmigrasi	Fasilitasi transmigrasi masih belum dijadikan solusi peningkatan kesejahteraan bagi masy. Mojokerto	1. terbatasnya kuota calon transmigran; 2. Kurangnya sosialisasi dan pembinaan ke masyarakat terhadap fasilitasi transmigrasi

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

Perubahan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 dengan membandingkan hasil analisis kebutuhan riil Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, pelaksanaan reviu RKPD dengan analisis rencana kerja kebutuhan PD masih disamakan, mengingat pada waktu penyusunan rancanganrencana kerja ini masih belum diterbitkan dokumen RKPD dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto. Reviu ini dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel TC-31.

TABEL TC-31
REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO

KODE	P RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					
	KETENAGAKERJAAN					KETENAGAKERJAAN					
01.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,45 (A)	5.585.710.950	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,45 (A)	5.585.710.950	
			Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	2 Inovasi				Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	2 Inovasi		
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase indikator program dinas tenaga kerja yang tercapai sesuai target	100 %	7.790.250	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase indikator program dinas tenaga kerja yang tercapai sesuai target	100 %	7.790.250	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.242.050	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.242.050	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Dokumen Rencana Kerja APBD			1 dokumen	1.688.875	Dokumen Rencana Kerja APBD			1 dokumen	1.688.875	
	Dokumen Rencana Kerja APBD			1 dokumen	1.553.175	Dokumen Rencana Kerja APBD			1 dokumen	1.553.175	

KODE	P RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.01.2.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	4.548.200	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	4.548.200	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Penyusunan Dokumen Evaluasi tiap Tribunal			4 dokumen	1.368.733	Penyusunan Dokumen Evaluasi tiap Tribunal			4 dokumen	1.368.733	
	Penyusunan Dokumen LKjIP			1 dokumen	1.607.933	Penyusunan Dokumen LKjIP			1 dokumen	1.607.933	
	Penyusunan Dokumen SAKIP			1 dokumen	1.571.534	Penyusunan Dokumen SAKIP			1 dokumen	1.571.534	
	Peningkatan kapasitas pengelolaan, ketersediaan data ketenagakerjaan dan kinerja OPD			Kegiatan	-	Peningkatan kapasitas pengelolaan, ketersediaan data ketenagakerjaan dan kinerja OPD			Kegiatan	-	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90,80 %	5.022.195.600	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90,80 %	5.022.195.600	
1.02.01.2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 Orang/bln	5.019.362.600	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 Orang/bln	5.019.362.600	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN			36 Org/bln	2.487.305.000	Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN			36 Org/bln	2.487.305.000	
	Tambahan Penghasilan ASN (TPP)			36 Org/bln	2.081.040.000	Tambahan Penghasilan ASN (TPP)			36 Org/bln	2.081.040.000	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya ASN			36 Org/bln	92.868.000	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya ASN			36 Org/bln	92.868.000	
	Pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Non ASN seluruh OPD dan Kecamatan			5527 Org/bln (12 bln)	358.149.600	Pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Non ASN seluruh OPD dan Kecamatan			5527 Org/bln (12 bln)	358.149.600	

KODE	P RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.01.2.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan admnistrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	2.833.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan admnistrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	2.833.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 dokumen	2.833.000	Pembiayaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 dokumen	2.833.000	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks profesionalitas asn dinas tenaga kerja	86,16 %	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks profesionalitas asn dinas tenaga kerja	86,16 %	-	
1.02.01.2.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	0 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	0 Paket	-	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Pengadaan Pakaian Dinas			0 paket	-	Pembiayaan Pengadaan Pakaian Dinas			0 paket	-	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	100 %	114.725.100	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	100 %	114.725.100	
1.02.01.2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Paket	53.259.700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Paket	53.259.700	
	RINCIAN :					RINCIAN :					

KODE	P RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembiayaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6 Paket	53.259.700	Pembiayaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6 Paket	53.259.700	
1.02.01.2.06.000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	7 Paket	8.600.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	9 Paket	8.600.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat			7 paket	8.600.000	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat			9 paket	8.600.000	
1.02.01.2.06.000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	11 Paket	19.621.400	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	11 Paket	19.621.400	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Barang Cetak dan Penggandaan			11 paket	19.621.400	Pembiayaan Barang Cetak dan Penggandaan			11 paket	19.621.400	
1.02.01.2.06.000 7	Penyediaan Bahan / Material		Jumlah paket bahan/ material yang disediakan	1 Paket	16.960.000	Penyediaan Bahan / Material		Jumlah paket bahan/ material yang disediakan	1 Paket	16.960.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan bahan/ material ATK			1 paket	16.960.000	Pembiayaan bahan/ material ATK			1 paket	16.960.000	

KODE	P RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.01.2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 Laporan	16.284.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	80 Laporan	16.284.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Rapat Perjalanan Dinas			100 laporan	16.284.000	Pembiayaan Rapat Perjalanan Dinas			80 laporan	16.284.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100 %	196.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100 %	196.000.000	
1.02.01.2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24 Laporan	70.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24 Laporan	70.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Jasa Komunikasi			12 bulan	6.218.806	Pembiayaan Jasa Komunikasi			12 bulan	6.218.806	
	Pembiayaan Jasa Air			0 bulan	-	Pembiayaan Jasa Air			0 bulan	-	
	Pembiayaan Jasa Listrik			12 bulan	63.781.194	Pembiayaan Jasa Listrik			12 bulan	63.781.194	

KODE	P RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.01.2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	126.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	126.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Non ASN)			12 Laporan	126.000.000	Pembiayaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Non ASN)			12 Laporan	126.000.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milih daerah dalam keadaan baik	100 %	245.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milih daerah dalam keadaan baik	100 %	245.000.000	
1.02.01.2.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit	55.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit	55.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor			6 Unit	50.000.000	Pembiayaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor			6 Unit	50.000.000	
	Pembiayaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Kantor			6 Unit	5.000.000	Pembiayaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Kantor			6 Unit	5.000.000	

KODE	P RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	0 Unit	175.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	0 Unit	175.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Rehabilitasi gedung kantor			Unit	175.000.000	Pembiayaan Rehabilitasi gedung kantor			Unit	175.000.000	
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	18 Unit	15.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	18 Unit	15.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor			18 Unit	15.000.000	Pembiayaan Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor			18 Unit	15.000.000	
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Kab. Mojokerto	Persentase program dan kegiatan yang mengacu perencanaan tenaga kerja	100 %	-	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Kab. Mojokerto	Persentase program dan kegiatan yang mengacu perencanaan tenaga kerja	100 %	-	
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	0 dokumen	-	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	0 dokumen	-	
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	0 dokumen	-	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	0 dokumen	-	

KODE	P RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja			0 dokumen	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja			0 dokumen	-	
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Mojokerto	Persentase lulusan peserta pelatihan berbasis kompetensi	92 %	595.815.300	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Mojokerto	Persentase lulusan peserta pelatihan berbasis kompetensi	92 %	595.815.300	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi	48 Orang	595.815.300	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi	64 Orang	595.815.300	
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	48 Orang	549.087.800	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	64 Orang	549.087.800	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pelatihan dan sertifikasi Operator Alat Berat (K)			0 Orang	149.087.800	Pelatihan dan Sertifikasi Barista (K)			16 Orang	149.087.800	
	Pelatihan dan Sertifikasi Barista (K)			16 Orang	100.000.000	Pelatihan Vokasi berbasis pondok pesantren			16 Orang	100.000.000	
	Pelatihan dan sertifikasi Digital marketing (K)			0 Orang							
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial (Peningkatan Keterampilan kerja) (DBHCHT)	CUKAI (DBHCHT)				Program Pembinaan Lingkungan Sosial (Peningkatan Keterampilan kerja) (DBHCHT)	CUKAI (DBHCHT)				
	RINCIAN :					RINCIAN :					

KODE	P RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelatihan dan sertifikasi Komputer Practical Office Advance			16 Orang	150.000.000	Pelatihan dan sertifikasi Komputer Practical Office Advance			16 Orang	150.000.000	
	Pelatihan dan sertifikasi Beauty Aesthetic (DBHCHT) (K)			16 Orang	150.000.000	Pelatihan dan sertifikasi Beauty Aesthetic (DBHCHT) (K)			16 Orang	150.000.000	
2.07.03.2.01.000 2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka optimaslisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	24 Lembaga	46.727.500	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka optimaslisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	24 Lembaga	46.727.500	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pemberdayaan dan Koordinasi kelembagaan vokasi			24 Lembaga	46.727.500	Pemberdayaan dan Koordinasi kelembagaan vokasi			24 Lembaga	46.727.500	
	Pelatihan metodologi instruktur lembaga pelatihan kerja			Lembaga	-	Pelatihan metodologi instruktur lembaga pelatihan kerja			Lembaga	-	
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina	0 Lembaga	-	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina	0 Lembaga	-	

KODE	P RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.03.2.02.000 1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	0 lembaga	-	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	0 lembaga	-	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembinaan dan peningkatan kapasitas lembaga pelatihan kerja swasta			0 LPK	-	Pembinaan dan peningkatan kapasitas lembaga pelatihan kerja swasta			0 LPK	-	
	Pembinaan Pemagangan dalam Negeri			0 Perusahaan	-	Pembinaan Pemagangan dalam Negeri			0 Perusahaan	-	
2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Jumlah perusahaan yang diberikan konsultasi produktivitas	0 Perusahaan	-	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Jumlah perusahaan yang diberikan konsultasi produktivitas	0 Perusahaan	-	
2.07.03.2.04.000 1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	0 Perusahaan	-	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	0 Perusahaan	-	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Konsultasi Produktivitas Perusahaan Kecil			0 perusahaan	-	Konsultasi Produktivitas Perusahaan Kecil			0 perusahaan	-	
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Kab. Mojokerto	Persentase perusahaan penyedia informasi lowongan kerja pada tahun n	16,0 %	146.091.750	Program Penempatan Tenaga Kerja	Kab. Mojokerto	Persentase perusahaan penyedia informasi lowongan kerja pada tahun n	16,0 %	146.091.750	

KODE	P RKPd TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.04.2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Fasilitas Pelayanan Antar Kerja Kab/ Kota yang tercapai sesuai target	100 %	49.918.750	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Fasilitas Pelayanan Antar Kerja Kab/ Kota yang tercapai sesuai target	100 %	49.918.750	
2.07.04.2.01.000 2	Pelayanan Antar Kerja		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	1 Orang	36.493.750	Pelayanan Antar Kerja		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	1 Orang	36.493.750	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Fasilitas Transmigrasi			1 Orang	36.493.750	Fasilitas Transmigrasi			1 Orang	36.493.750	
2.07.04.2.01.000 5	Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	25 Orang	13.425.000	Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	25 Orang	13.425.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)			25 orang	13.425.000	Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)			25 orang	13.425.000	
	Pembinaan tenaga pendamping TKA			0 orang	-	Pembinaan tenaga pendamping TKA			0 orang	-	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Persentase Fasilitas pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) yang tercapai sesuai target	100 %	74.550.000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Persentase Fasilitas pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) yang tercapai sesuai target	100 %	74.550.000	

KODE	P RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.04.2.03.000 3	Job Fair / Bursa Kerja		Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	100 Orang	74.550.000	Job Fair / Bursa Kerja		Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	100 Orang	74.550.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Job Fair			10 stand	74.550.000	Job Fair			10 stand	74.550.000	
	Penyuluhan informasi bursa kerja				-	Penyuluhan informasi bursa kerja				-	
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah orang terfasilitasi perlindungan PMI	35 Orang	21.623.000	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah orang terfasilitasi perlindungan PMI	35 Orang	21.623.000	
2.07.04.2.04.000 1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah CPMI/ PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	35 Orang	21.623.000	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah CPMI/ PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	35 Orang	21.623.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembinaan Calon PMI (Pekerja Migran Indonesia)			35 orang	21.623.000	Pembinaan Calon PMI (Pekerja Migran Indonesia)			35 orang	21.623.000	
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Kab. Mojokerto	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	86 %	4.065.520.200	Program Hubungan Industrial	Kab. Mojokerto	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	86 %	4.065.520.200	
			Persentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial	11,7 %				Persentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial	11,7 %		

KODE	P RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota		Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang tercapai sesuai target	100 %	4.065.520.200	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota		Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang tercapai sesuai target	100 %	4.065.520.200	
2.07.05.2.02.000 1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Perselisihan yang dicegah	20 Perkara	79.825.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Perselisihan yang dicegah	20 Perkara	79.825.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Sosialisasi Upah Minimum Kab. Mojokerto			0 Orang	-	Sosialisasi Upah Minimum Kab. Mojokerto			0 Orang	-	
	Pembinaan syarat kerja dan sistem outsourcing			0 Orang		Pembinaan syarat kerja dan sistem outsourcing			Orang		
	Harmonisasi Kelembagaan Hubungan Industrial			0 perusahaan	-	Harmonisasi Kelembagaan Hubungan Industrial			perusahaan	-	
	Peningkatan Kinerja Dewan Pengupahan			3 kegiatan	79.825.000	Peningkatan Kinerja Dewan Pengupahan			3 kegiatan	79.825.000	
	Pembinaan struktur skala upah					Pembinaan struktur skala upah			0 Perusahaan		
2.07.05.2.02.000 2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	0 Perkara	-	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	0 Perkara	-	

KODE	P RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial			0 Perkara	-	Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial			0 Perkara	-	
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	33.725.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	33.725.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit			2 Kegiatan	33.725.000	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit			2 Kegiatan	33.725.000	
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	27930 Orang	3.951.970.200	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	27930 Orang	3.951.970.200	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Monitoring dan sosialisasi penggunaan pekerja perempuan dan anak			50 Orang	31.953.434	Monitoring dan sosialisasi penggunaan pekerja perempuan dan anak			50 Orang	31.953.434	
	Peningkatan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja			60 Orang	45.899.383	Peningkatan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja			60 Orang	45.899.383	
	Monitoring perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan			80 Orang	70.861.383	Monitoring perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan			80 Orang	70.861.383	
	Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan untuk petani tembakau dan Pekerja Rentan lainnya Melalui Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)			27740 Orang	3.803.256.000	Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan untuk petani tembakau dan Pekerja Rentan lainnya Melalui Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)			27740 Orang	3.803.256.000	

KODE	P RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					10.393.138.200					10.393.138.200	

2.5 PENELAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Bahwa kajian dalam penelaan usulan program dan kegiatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja berpedoman kepada Program-program Nasional dan prioritas kebutuhan masyarakat wilayah Kabupaten Mojokerto, dimana dapat dilihat pada Tabel TC-32

TABEL TC-32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029, maka diperoleh hasil telaah sebagai berikut:

RENCANA STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025-2029			
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya masyarakat jawa timur yang adil, sejahtera unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong	Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan	Meningkatkan pedayagunaan tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja serta sebagai upaya menurunkan pengangguran	Meningkatnya kualitas produktivitas dan kompetensi tenaga kerja
			Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
			Meningkatnya efektivitas pembinaan dan mediasi hubungan industrial;
			Meningkatnya efektifitas pengawasan di bidang norma ketenagakerjaan;
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto dalam mensinkronisasikan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, perlu terlebih dahulu memetakan visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah Terpilih 2025-2029, yaitu antara lain :

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029			
VISI	MISI KE 3	TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil dan makmur	Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi	Menurunnya Angka Pengangguran

Dalam rangka turut mendukung pelaksanaan kebijakan prioritas nasional tersebut maka disusun program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 antara lain:

- 1. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
- 2. Program penempatan tenaga kerja
- 3. Program hubungan industrial

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka untuk mendukung visi dan misi kepala daerah terpilih periode 2025-2029, Dinas Tenaga Kerja Melaksanakan Misi Ke 3 dan sebagai pedoman sinkronisasi maka berikut ini adalah tabel pemetaan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah:

TABEL PEMETAAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029		
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Menurunnya Angka Pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase penempatan tenaga kerja
	Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan kondusif	Persentase tingkat perselelisihan hubungan industrial
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Untuk mengetahui keselarasan tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan visi, misi kepala daerah terpilih periode 2025-2029, berikut ini kami lampirkan tabel matriks tujuan dan sasaran perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, yaitu :

TABEL MATRIKS
KESELARASAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH DAERAH					PERANGKAT DAERAH		
VISI	MISI 3	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Lebih Maju, Adil Dan Makmur							
	Membangun kemandirian ekonomi bagi industri pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat						
		Menurunkan kemiskinan dan pemerataan pendapatan		. Indeks Gini			
			Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Menurunnya angka pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
						Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja
						Meningkatnya Kondisi Hubungan Industrial Yang Harmonis, Dinamis Dan Kondusif	Persentase Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial Di Perusahaan

Berikut ini ditampilkan Tabel 3.2.2 sebagai pedoman capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dengan indikator capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto.

TABEL 3.2.2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Penurunan Angka Pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,76	4,15-3,60	4,14-3,42	4,13-3,23	4,05-3,09	4,00-3,01	3,95-2,96
		Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,30 (A)	81,45 (A)	81,50 (A)	81,75 (A)	82,00 (A)	82,25 (A)	82,30 (A)
		Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	86,21	86,50	86,75	87	87,25	87,50	88
		Meningkatnya Kondisi Hubungan Industrial Yang Harmonis, Dinamis Dan Kondusif	Persentase Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial Di Perusahaan	3%	1,50%	1,45%	1,40%	1,35%	1,30%	1,25%

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai dengan tupoksinya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Ketenagakerjaan. Dimana pada tahun 2025 mendatang diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di bidang Ketenagakerjaan.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025, sesuai rencana strategis dan RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto masih mengusung tema permasalahan menurunkan angka pengangguran yang berkorelasi dengan angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) maka dari itu adapun program dan kegiatan di bidang ketenagakerjaan dalam penanganan penekanan tingkat pengangguran terbuka harus tepat sasaran agar pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Mojokerto berhasil pada 5 (lima) tahun ke depan ini, Program, Kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana nomenklatur dan kodefikasi tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel TC – 33.

TABEL TC-33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN MOJOKERTO

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
	KETENAGAKERJAAN								
01.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		81,45 (A)	5.585.710.950			81,45 (A)	5.976.710.717
		Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan		2 Inovasi				2 Inovasi	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program dinas tenaga kerja yang tercapai sesuai target		100 %	7.790.250			100 %	8.335.568
1.02.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	3.242.050			2 Dokumen	3.468.994
	RINCIAN :								
	Dokumen Rencana Kerja APBD			1 dokumen	1.688.875			1 dokumen	1.807.096
	Dokumen Rencana Kerja PAPBD			1 dokumen	1.553.175			1 dokumen	1.661.897

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 Laporan	4.548.200			6 Laporan	4.866.574
	RINCIAN :								
	Penyusunan Dokumen Evaluasi tiap Tribulan			4 dokumen	1.368.733			4 dokumen	1.464.544
	Penyusunan Dokumen LKjIP			1 dokumen	1.607.933			1 dokumen	1.720.488
	Penyusunan Dokumen SAKIP			1 dokumen	1.571.534			1 dokumen	1.681.541
	Peningkatan kapasitas pengelolaan, ketersediaan data ketenagakerjaan dan kinerja OPD			Kegiatan	-			Kegiatan	-
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		90,80 %	5.022.195.600			90,80 %	5.373.749.292
1.02.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		36 Orang/bln	5.019.362.600			36 Orang/bln	5.370.717.982
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN			36 Org/bln	2.487.305.000			36 Org/bln	2.661.416.350
	Tambahan Penghasilan ASN (TPP)			36 Org/bln	2.081.040.000			36 Org/bln	2.226.712.800
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya ASN			36 Org/bln	92.868.000			36 Org/bln	99.368.760
	Pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Non ASN seluruh OPD dan Kecamatan			5527 Org/bln (12 bln)	358.149.600			5527 Org/bln (12 bln)	383.220.072

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.02.00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan admnistrasi pelaksanaan tugas ASN		1 dokumen	2.833.000			1 dokumen	3.031.310
	RINCIAN :								
	Pembiayaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 dokumen	2.833.000			1 dokumen	3.031.310
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks profesionalitas asn dinas tenaga kerja		86,15 %	-			86,15 %	-
1.02.01.2.05.00 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		0 Paket	-			0 Paket	-
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Pengadaan Pakaian Dinas			paket	-			paket	-
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum perangkat daerah sesuai kebutuhan		100 %	114.725.100			100 %	122.755.857
1.02.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		6 Paket	53.259.700			6 Paket	56.987.879
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6 Paket	53.259.700			6 Paket	56.987.879

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		6 Paket	8.600.000			6 Paket	9.202.000
	RINCIAN :								
	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat			6 paket	8.600.000			6 paket	9.202.000
1.02.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan		11 Paket	19.621.400			11 Paket	20.994.898
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Barang Cetak dan Penggandaan			11 paket	19.621.400			11 paket	20.994.898
1.02.01.2.06.00 07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan/ material yang disediakan		1 Paket	16.960.000			1 Paket	18.147.200
	RINCIAN :								
	Pembiayaan bahan/ material ATK			1 paket	16.960.000			1 paket	18.147.200
1.02.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		80 Laporan	16.284.000			80 Laporan	17.423.880
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Rapat Perjalanan Dinas			80 laporan	16.284.000			80 laporan	17.423.880

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan		100 %	196.000.000			100 %	209.720.000
1.02.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		24 Laporan	70.000.000			24 Laporan	74.900.000
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Jasa Komunikasi			12 bulan	6.218.806			12 bulan	6.654.122
	Pembiayaan Jasa Air			0 bulan	-			0 bulan	-
	Pembiayaan Jasa Listrik			12 bulan	63.781.194			12 bulan	68.245.878
1.02.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		12 Laporan	126.000.000			12 Laporan	134.820.000
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Non ASN)			12 Laporan	126.000.000			12 Laporan	134.820.000
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milih daerah dalam keadaan baik		100 %	245.000.000			100 %	262.150.000
1.02.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan		6 Unit	55.000.000			6 Unit	58.850.000

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan pajak dan perizinannya							
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor			6 Unit	50.000.000			6 Unit	53.500.000
	Pembiayaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Kantor			6 Unit	5.000.000			6 Unit	5.350.000
1.02.01.2.09.00 09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		1 Unit	175.000.000			1 Unit	187.250.000
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Rehabilitasi gedung kantor			1 Unit	175.000.000			1 Unit	187.250.000
1.02.01.2.09.00 10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		18 Unit	15.000.000			18 Unit	16.050.000
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor			18 Unit	15.000.000			18 Unit	16.050.000

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase program dan kegiatan yang mengacu perencanaan tenaga kerja		100 %	-			100 %	-
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun		0 dokumen	-			0 dokumen	-
2.07.02.2.01.00 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro		0 dokumen	-			0 dokumen	-
	RINCIAN :								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja			0 dokumen	-			0 dokumen	-
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan peserta pelatihan berbasis kompetensi		92 %	595.815.300			92 %	637.522.371
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi		64 Orang	595.815.300			64 Orang	637.522.371
2.07.03.2.01.00 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n		64 Orang	549.087.800			64 Orang	587.523.946
	RINCIAN :								
	Pelatihan dan Sertifikasi Barista (K)			16 Orang	149.087.800			16 Orang	159.523.946
	Pelatihan Vokasi berbasis pondok pesantren			16 Orang	100.000.000			16 Orang	107.000.000

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DBHCHT								
	RINCIAN :								
	Pelatihan dan sertifikasi Komputer Practical Office Advance			16 Orang	150.000.000			16 Orang	160.500.000
	Pelatihan dan sertifikasi Beauty Aesthetic (DBHCHT) (K)			16 Orang	150.000.000			16 Orang	160.500.000
2.07.03.2.01.00 02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n		24 Lembaga	46.727.500			24 Lembaga	49.998.425
	RINCIAN :								
	Pemberdayaan dan Koordinasi kelembagaan vokasi			24 Lembaga	46.727.500			24 Lembaga	49.998.425
	Pelatihan metodologi instruktur lembaga pelatihan kerja			Lembaga	-			Lembaga	-
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina		0 Lembaga	-			0 Lembaga	-
2.07.03.2.02.00 01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina		0 lembaga	-			0 lembaga	-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	RINCIAN :								
	Pembinaan dan peningkatan kapasitas lembaga pelatihan kerja swasta			LPK	-			LPK	-
	Pembinaan Pemagangan dalam Negeri			Perusahaan	-			Perusahaan	-
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan yang diberikan konsultasi produktivitas		0 Perusahaan	-			0 Perusahaan	-
2.07.03.2.04.00 01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas		0 Perusahaan	-			0 Perusahaan	-
	RINCIAN :								
	Konsultasi Produktivitas Perusahaan Kecil			perusahaan	-			perusahaan	-
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase perusahaan penyedia informasi lowongan kerja pada tahun n		16,0 %	146.091.750			16,0 %	156.318.173
2.07.04.2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Antar Kerja Kab/ Kota yang tercapai sesuai target		100 %	49.918.750			100 %	53.413.063
2.07.04.2.01.00 02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL		1 Orang	36.493.750			1 Orang	39.048.313

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	RINCIAN :								
	Fasilitasi Transmigrasi			1 Orang	36.493.750			1 Orang	39.048.313
2.07.04.2.01.00 05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja		25 Orang	13.425.000			25 Orang	14.364.750
	RINCIAN :								
	Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)			25 orang	13.425.000			25 orang	14.364.750
	Pembinaan tenaga pendamping TKA			0 orang	-			0 orang	-
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Fasilitasi pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) yang tercapai sesuai target		100 %	74.550.000			100 %	79.768.500
2.07.04.2.03.00 03	Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja		100 Orang	74.550.000			100 Orang	79.768.500
	RINCIAN :								
	Job Fair			20 stand	74.550.000			20 stand	79.768.500
	Penyuluhan informasi bursa kerja				-				-
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang terfasilitasi perlindungan PMI		35 Orang	21.623.000			35 Orang	23.136.610

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.04.2.04.00 01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/ PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya		35 Orang	21.623.000			35 Orang	23.136.610
	RINCIAN :								
	Pembinaan Calon PMI (Pekerja Migran Indonesia)			35 orang	21.623.000			35 orang	23.136.610
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan		86 %	4.065.520.200			86 %	4.350.106.614
		Persentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial		11,7 %				11,7 %	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang tercapai sesuai target		100 %	4.065.520.200			100 %	4.350.106.614
2.07.05.2.02.00 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah		20 Perkara	79.825.000			20 Perkara	85.412.750

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	RINCIAN :								
	Sosialisasi Upah Minimum Kab. Mojokerto			Orang	-			50 Orang	-
	Pembinaan syarat kerja dan sistem outsourcing			Orang	-			Orang	-
	Harmonisasi Kelembagaan Hubungan Industrial			perusahaan	-			perusahaan	-
	Peningkatan Kinerja Dewan Pengupahan			3 kegiatan	79.825.000			3 kegiatan	85.412.750
	Pembinaan struktur skala upah			Perusahaan	-			50 Perusahaan	-
2.07.05.2.02.00 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan		0 Perkara	-			0 Perkara	-
	RINCIAN :								
	Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial			Perkara	-			Perkara	-
2.07.05.2.02.00 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina		1 Lembaga	33.725.000			1 Lembaga	36.085.750
	RINCIAN :								

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit			2 Kegiatan	33.725.000			2 Kegiatan	36.085.750
2.07.05.2.02.00 05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja		2793 Orang 0	3.951.970.200			27930 Orang	4.228.608.114
	RINCIAN :								
	Monitoring dan sosialisasi penggunaan pekerja perempuan dan anak			50 Orang	31.953.434			50 Orang	34.190.174
	Peningkatan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja			60 Orang	45.899.383			60 Orang	49.112.340
	Monitoring perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan			80 Orang	70.861.383			80 Orang	75.821.680
	Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan untuk petani tembakau dan Pekerja Rentan lainnya Melalui Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	55480		2774 Orang 0	3.803.256.000			27740 Orang	4.069.483.920
					10.393.138.200				11.120.657.874

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bahwa perubahan rencana kerja dan pendanaan perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan rekapitulasi rancangan tahun 2025 yang memuat usulan program dan kegiatan kemudian disinkronisasikan melalui PRKPD dengan pagu indikatif yang meliputi anggaran berbasis PAPBD, PAPBD Provinsi serta APBN dengan sumber dana yang berbasis dana transfer umum dan dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT) sebagaimana terdapat pada Tabel 4.1.

TABEL 4.1
MATRIKS PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR												
	KETENAGAKERJAAN												
01.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,45 (A)		5.585.710.950					
					Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	2 Inovasi							
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase indikator program dinas tenaga kerja yang tercapai sesuai target		100 %		7.790.250					
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen		3.242.050					
	RINCIAN :												
	Dokumen Rencana Kerja APBD					1 dokumen		1.688.875					
	Dokumen Rencana Kerja PAPBD					1 dokumen		1.553.175					
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 Laporan		4.548.200					
	RINCIAN :												
	Penyusunan Dokumen Evaluasi tiap Tribulan					4 dokumen		1.368.733					
	Penyusunan Dokumen LKJIP					1 dokumen		1.607.933					
	Penyusunan Dokumen SAKIP					1 dokumen		1.571.534					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Peningkatan kapasitas pengelolaan, ketersediaan data ketenagakerjaan dan kinerja PD					Kegiatan		-					
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		90,80 %		5.022.195.600					
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		36 Orang/bln		5.019.362.600					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN					36 Org/bln		2.487.305.000					
	Tambahan Penghasilan ASN (TPP)					36 Org/bln		2.081.040.000					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya ASN					36 Org/bln		92.868.000					
	Pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Non ASN seluruh PD dan Kecamatan					5527 Org/bln (12 bln)		358.149.600					
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah dokumen hasil penyediaan admistrasi pelaksanaan tugas ASN		1 dokumen		2.833.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					1 dokumen		2.833.000					
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Indeks profesionalitas asn dinas tenaga kerja		86,15 %		-					
1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		0 Paket		-					
	RINCIAN :												

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pembiayaan Pengadaan Pakaian Dinas					paket		-					
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Penyediaan Administrasi Umum perangkat daerah sesuai kebutuhan		100 %		114.725.100					
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		6 Paket		53.259.700					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					6 Paket		53.259.700					
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		6 Paket		8.600.000					
	RINCIAN :												
	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat					6 paket		8.600.000					
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan		11 Paket		19.621.400					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Barang Cetak dan Penggandaan					11 paket		19.621.400					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan / Material			Jumlah paket bahan/ material yang disediakan		1 Paket		16.960.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan bahan/ material ATK					1 paket		16.960.000					
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		80 Laporan		16.284.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Rapat Perjalanan Dinas					80 laporan		16.284.000					
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan		100 %		196.000.000					
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		24 Laporan		70.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Jasa Komunikasi					12 bulan		6.218.806					
	Pembiayaan Jasa Air					0 bulan		-					
	Pembiayaan Jasa Listrik					12 bulan		63.781.194					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		12 Laporan		126.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Non ASN)					12 Laporan		126.000.000					
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase barang milih daerah dalam keadaan baik		100 %		245.000.000					
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		6 Unit		55.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor					6 Unit		50.000.000					
	Pembiayaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Kantor					6 Unit		5.000.000					
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		1 Unit		175.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Rehabilitasi gedung kantor					1 Unit		175.000.000					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		18 Unit		15.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor					18 Unit		15.000.000					
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja				Persentase program dan kegiatan yang mengacu perencanaan tenaga kerja	100 %		-					
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			Jumlah Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun		0 dokumen		-					
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro		0 dokumen		-					
	RINCIAN :												
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja					0 dokumen		-					
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja				Persentase lulusan peserta pelatihan berbasis kompetensi	92 %		595.815.300					
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi		64 Orang		595.815.300					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n		64 Orang		549.087.800					
	RINCIAN :												
	Pelatihan dan Sertifikasi Barista (K)					16 Orang		149.087.800					
	Pelatihan Vokasi berbasis pondok pesantren					16 Orang		100.000.000					
	DBHCHT												
	RINCIAN :												
	Pelatihan dan sertifikasi Komputer Practical Office Advance					16 Orang		150.000.000					
	Pelatihan dan sertifikasi Beauty Aesthetic (DBHCHT) (K)					16 Orang		150.000.000					
2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja			Jumlah kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n		24 Lembaga		46.727.500					
	RINCIAN :												
	Pemberdayaan dan Koordinasi kelembagaan vokasi					24 Lembaga		46.727.500					
	Pelatihan metodologi instruktur lembaga pelatihan kerja					Lembaga		-					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina		0 Lembaga		-					
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina		0 lembaga		-					
	RINCIAN :												
	Pembinaan dan peningkatan kapasitas lembaga pelatihan kerja swasta					LPK		-					
	Pembinaan Pemagangan dalam Negeri					Perusahaan		-					
2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			Jumlah perusahaan yang diberikan konsultasi produktivitas		0 Perusahaan		-					
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil			Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas		0 Perusahaan		-					
	RINCIAN :												
	Konsultasi Produktivitas Perusahaan Kecil					perusahaan		-					
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja				Persentase perusahaan penyedia informasi lowongan kerja pada tahun n	16,0 %		146.091.750					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.07.04.2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota			Persentase Fasilitas Pelayanan Antar Kerja Kab/ Kota yang tercapai sesuai target		100 %		49.918.750					
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan Antar Kerja			Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL		1 Orang		36.493.750					
	RINCIAN :												
	Fasilitas Transmigrasi					1 Orang		36.493.750					
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja			Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja		25 Orang		13.425.000					
	RINCIAN :												
	Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)					25 orang		13.425.000					
	Pembinaan tenaga pendamping TKA					0 orang		-					
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			Persentase Fasilitas pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) yang tercapai sesuai target		100 %		74.550.000					
2.07.04.2.03.0003	Job Fair / Bursa Kerja			Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja		100 Orang		74.550.000					
	RINCIAN :												
	Job Fair					20 stand		74.550.000					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyuluhan informasi bursa kerja							-					
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah orang terfasilitasi perlindungan PMI		35 Orang		21.623.000					
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			Jumlah CPMI/ PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya		35 Orang		21.623.000					
	RINCIAN :												
	Pembinaan Calon PMI (Pekerja Migran Indonesia)					35 orang		21.623.000					
2.07.05	Program Hubungan Industrial				Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	86 %		4.065.520.200					
					Persentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial	11,7 %							
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota			Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang tercapai sesuai target		100 %		4.065.520.200					
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah Perselisihan yang dicegah		20 Perkara		79.825.000					
	RINCIAN :												

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Sosialisasi Upah Minimum Kab. Mojokerto					Orang		-					
	Pembinaan syarat kerja dan sistem outsourcing					Orang		-					
	Harmonisasi Kelembagaan Hubungan Industrial					perusahaan		-					
	Peningkatan Kinerja Dewan Pengupahan					3 kegiatan		79.825.000					
	Pembinaan struktur skala upah					Perusahaan		-					
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan		0 Perkara		-					
	RINCIAN :												
	Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial					Perkara		-					
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah LKS Tripartit yang dibina		1 Lembaga		33.725.000					
	RINCIAN :												
	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit					2 Kegiatan		33.725.000					
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja		27930 Orang		3.951.970.200					
	RINCIAN :												

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Monitoring dan sosialisasi penggunaan pekerja perempuan dan anak					50 Orang		31.953.434					
	Peningkatan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja					60 Orang		45.899.383					
	Monitoring perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan					80 Orang		70.861.383					
	Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan untuk petani tembakau dan Pekerja Rentan lainnya Melalui Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)					27740 Orang		3.803.256.000					
								10.393.138.200					

BAB V

PENUTUP

a. Catatan Penting

Dokumen perubahan rencana kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 yang telah disusun ini, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan rencana kerja tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2025 yang akan datang.

b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Bahwa pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada dokumen rancangan rencana kerja Tahun 2026 Dinas Tenaga Kerja berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto 2025-2029.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dalam pelaksanaan perubahan rencana kerja tahun 2025 telah disesuaikan dengan kondisi dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 karena Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan dokumen perencanaan.

Mojokerto, 7 Juli 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO,



MOHAMMAD TAUFIQUEURROHMAN, S.STP., MM

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19770221 199511 1 001